

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Studi tentang sejarah perkotaan kini berkembang pesat. Kemajuan dalam penelitian ini tak lepas dari pengaruh isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kini beralih ke lingkungan perkotaan.<sup>1</sup> Setiap kota memiliki keunikannya sendiri, dan beragam aktivitas masyarakat menciptakan pola kehidupan dinamis di dalamnya. Ada banyak kriteria untuk menentukan apakah suatu area layak disebut kota.<sup>2</sup>

Di Indonesia, istilah "kota" mencakup kota praja, ibu kota kabupaten, dan tempat lain yang memiliki ciri-ciri perkotaan.<sup>3</sup> Kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan, atau kombinasi dari semuanya. Oleh karena itu, status sebuah wilayah sebagai kota tidak bisa ditentukan hanya dari ukuran atau kepadatan penduduknya. Berbagai definisi dapat digunakan dari berbagai sudut pandang untuk mengidentifikasi apakah suatu wilayah dapat disebut sebagai kota.

Pada masa pra-kolonial, perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi alam. Pulau Jawa, yang terletak dalam lingkaran cincin api Pasifik, memiliki banyak gunung berapi yang membentang dari barat ke timur. Gunung, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah menyediakan kondisi yang sangat cocok untuk pertanian.<sup>4</sup> Wilayah-wilayah ini dihubungkan oleh sungai, sehingga pusat kegiatan manusia sering ditemukan di lembah sungai. Salah satunya adalah Lembah

---

<sup>1</sup> Sri Margana and M. Nursam, *Kota-Kota Di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, Dan Permasalahan Sosial*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sri Margana, *ibid*, hlm. 20.

<sup>3</sup> Sri Margana, *ibid*. hlm. 20

<sup>4</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 22.

Sungai Serayu, yang telah menjadi pusat peradaban manusia jauh sebelum masa kolonial.

Secara geografis, Lembah Sungai Serayu memiliki topografi yang beragam, dikelilingi oleh dataran rendah dan perbukitan yang membentang dari utara ke selatan. Kawasan ini dialiri oleh Sungai Serayu, sehingga dinamakan Lembah Sungai Serayu. Lembah ini mencakup beberapa daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah hingga Jawa Barat, antara lain Banyumas, Purwokerto, dan Banjar. Letak geografis Banyumas yang strategis membuatnya sangat cocok untuk kawasan pertanian dan perkebunan.<sup>5</sup> Bahkan wilayah ini sempat menjadi salah satu lumbung padi pada masa Mataram.

Sebelum terjadinya Perang Diponegoro (1825-1830) Kadipaten Banyumas masih dibawah wilayah kekuasaan Kasunan Surakarta, setelah perang barulah kawasan ini jatuh ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1830.<sup>6</sup> Penguasaan Kolonial Hindia Belanda membawa perubahan yang sangat drastis pada bidang ekonomi, terlebih ketika memasuki masa ekonomi liberal pasca berakhirnya kebijakan tanam Paksa. Dengan diterapkannya Politik Liberal di Hindia Belanda yang dimulai sejak tahun 1870 ditandai dengan terbitnya Undang-undang Agraria, pemerintah kolonial membuka kesempatan sebesar besarnya bagi para pengusaha swasta asing yang ingin berinvestasi dalam berbagai bidang ekonomi seperti perkebunan, perdagangan, hingga pertanian. Untuk menunjang investasi pemerintah Belanda banyak membangun prasarana transportasi dan infrastruktur keperluan ekspor produksi tanaman.

Modernisasi adalah proses perubahan menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, modernisasi dapat dipahami sebagai transisi dari sesuatu yang bersifat tradisional menjadi sesuatu yang lebih modern, dengan tujuan utama untuk

---

<sup>5</sup> Tanto Sukardi, *Tanam Paksa Di Banyumas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 11-12.

<sup>6</sup> Budiono Herusatoto, *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa Dan Watak* (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 14.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilbert E. Moore berpendapat bahwa modernisasi merupakan perubahan menyeluruh dari kehidupan yang tradisional atau pra-modern, baik dalam teknologi maupun organisasi sosial, menuju pola ekonomi dan politik yang khas dari negara-negara barat yang stabil.<sup>7</sup>

Modernisasi yang dipicu oleh industrialisasi membawa banyak perubahan besar dalam kelas sosial dan struktur masyarakat. Dari kemunculan kelas pekerja dan pengusaha hingga peningkatan mobilitas sosial dan perubahan dalam struktur masyarakat, dampaknya sangat luas dan mendalam.

Industralisasi Pertanian pada akhir abad ke 19 didorong akibat dilangsungkannya Undang-undang Agraria yang menuntut pembangunan infrastruktur, modernisasi teknologi, serta inovasi dari sektor lainnya seperti birokrasi, administrasi, pendidikan yang lebih memadai.<sup>8</sup> Peralihan pengelolaan dari pemerintah ke pihak swasta terutama pada bidang perkenunan dan pertanian juga terjadi di Banyumas, terutama pada perkebunan tebu. Hal ini terlihat dari areal perkebunan tebu yang semakin meluas juga diikuti dengan berdirinya pabrik pabrik gula. Kemajuan ekonomi pada awal abad 20 tidak hanya diwujudkan dalam perluasan areal perkebunan saja, melainkan juga teknik manajemen yang lebih modern dari mula nya menggunakan tenaga manusia atau sapi menjadi menggunakan tenaga mesin sehingga mempercepat produksi komoditas.

Industralisasi di Hinda Belanda pertama kali ditandai dengan penggunaan mesin uap pada pabrik gula di Jawa, salah satu dari pabrik gula yang pertama kali menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin adalah Pabrik Gula Kalibagor yang berada di Banyumas. Pabrik ini didirikan pada tahun 1839 oleh Sir Edward Cooke. Setelah mesin uap menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi, hasil produksi

---

<sup>7</sup> E. Moore Willbert, *Social Change*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1963).

<sup>8</sup> Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V* (Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1992), hlm. 181.

meningkat drastis dikarenakan dalam pengerjaanya lebih cepat dan banyak dalam waktu yang singkat

Sebagai pioner pabrik gula di karasidenan Banyumas, pabrik ini berhasil menarik minat perusahaan-perusahaan kereta api untuk membangun jalur-jalur kereta di karasidenan Banyumas untuk kepentingan Industrilisasi gula. Dengan adanya moda transportasi kereta di karasidenan Banyumas, membuka pintu masuk modernisasi besar-besaran di Jawa bagian selatan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Banyumas tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan saja, melainkan banyak sector lain yang juga berkembang di daerah ini pada masa awal abad 20. Bidang produksi banyak bertambah setelah para pengusaha asing membangun perekonomiannya sendiri dalam berbagai industry seperti tenun, anyaman, batik, perkakas, produsen kereta api hingga tambang.<sup>9</sup>

Pada awal-awal abad ke- 20 lahir sebuah gagasan baru yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik balas budi. Gagasan ini merupakan bentuk pengembalian jasa pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat melalui Politik Etis. Gagasan ini difokuskan pada tiga bidang yaitu pendidikan, pembangunan irigasi, dan imigrasi pemerataan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa. Gagasan ini berdamak besar pada pada pembangunan masyarakat di Hindia Belanda.<sup>10</sup>

Banyumas pada saat itu merupakan sebuah karasidenan yang luas juga termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda memasuki masa Politik Etis dan desentralisasi pembangunan daerah semakin ditingkatkan. Undang-undang desentralisasi resmi ditetapkan pada 1903 memberikan kesempatan bagi Dewan Daerah untuk mengelola wilayah mereka secara mandiri, termasuk menjadikan Banyumas sebagai daerah

---

<sup>9</sup> Bijlage C, Kolonial Verslag, 1892, hlm. 1-4.

<sup>10</sup> Soegijanto Padmo, *Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia: Bunga Rampai* (Yogyakarta: Aditya Media bekerja sama dengan jurusan sejarah FIB UGM, 2004), hlm. 51.

otonom pada tahun 1907 yang kemudian tercatat dalam *Staatsblad* No. 146 Thn 1907.

Ditengah kemajuan ekonomi dan teknologi dunia pada masa itu, pecahlah Perang Dunia I tahun 1914 hingga 1918 hingga menimbulkan depresi ekonomi besar besaran hingga pada puncaknya 1929 ditandai dengan jatuhnya bursa efek New York. Bagi Hindia Belanda ini berarti bangkrutnya perusahaan swasta dan pemerintah. Hal ini juga berdampak hingga ke Banyumas, tahun 1933 pabrik-pabrik di Banyumas semua tutup.

Krisis ekonomi ini juga sering disebut dengan zaman *Malaise*. Kelesuan pasar global, khususnya dalam hal kebutuhan bahan mentah, menyebabkan ekonomi Hindia Belanda bergantung pada pendapatan dari ekspor bahan-bahan mentah, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan. Keadaan masyarakat Banyumas sangat memprihatinkan sehingga kelaparan terjadi dimana mana.

Hal serupa juga terjadi pada kas pemerintah Hindia Belanda yang mengalami krisis keuangan, sehingga pemerintah berupaya berbagai cara untuk mengembalikan keadaan antara lain dengan mereskrotuksi sistem birokrasi yang ada. Pemerintah juga melakukan pengkajian mengenai penghapusan dan penggabungan beberapa wilayah kabupaten, hal ini termasuk pengkajian pemisahan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto, yang kemudian ter realisasi dengan pemindahan Ibukota Kabupaten dan Karasidenan yang dilakukan oleh Residen Banyumas H. G. F. Van Huls.<sup>11</sup>

Pemindahan ibu kota kabupaten mengungkapkan adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur yang terpusat pada area-area tertentu, dengan faktor geografis sebagai penyebab utama. Sungai Serayu yang mengisolasi Banyumas dari daerah lain menyebabkan Banyumas tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Sebaliknya, Purwokerto

---

<sup>11</sup> Sri Margana, *loc.cit*, hlm. 26-27.

menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat berkat adanya pasar wage dan pabrik-pabrik gula.<sup>12</sup>

Pemindahan ibu kota Kabupaten Banyumas telah memicu berbagai pendapat, termasuk penolakan dari anggota dewan pemerintah pada masa itu. Banyak yang menganggap bahwa pemindahan ibu kota adalah langkah mundur bagi wilayah tersebut. Saat ini, pemerintah bersama peneliti dan akademisi masih terus mengkaji kemungkinan pemisahan kembali Kabupaten Banyumas dan Purwokerto. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pemindahan ibu kota membawa dampak signifikan pada ekonomi masyarakat dan kas pemerintah. Penelitian berjudul “Modernisasi Kota Purwokerto Tahun 1930-1942” ini bertujuan untuk menyelidiki dampak tersebut dari sudut pandang sosial dan ekonomi, dengan harapan dapat menambah wawasan baru mengenai efek pemindahan ibu kota.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, penulis berfokus pada dua rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Kota Purwokerto tahun 1930-1942?
2. Bagaimana Perkembangan Modernisasi Kota Purwokerto tahun 1930-1942?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, penulis berfokus pada dua tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran umum geografis dan demografis Kota Purwokerto tahun 1930-1942.
2. Untuk mengetahui sejarah Perkembangan Modernisasi Kota Purwokerto tahun 1930-1942.

## **D. Kajian Pustaka**

Penulisan sejarah tentang sejarah modernisasi kota di Indonesia sudah banyak yang menuliskannya, akan tetapi penulisan sejarah yang

---

<sup>12</sup> Jo Santoso, *Arsitektur Kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa* (Jakarta: Centropolis, 2008), hlm. 176.

fokus membahas tentang sejarah modernisasi kota Purwokerto masa kolonial masih terbatas jumlahnya. Meskipun begitu, informasi mengenai sejarah modernisasi kota Purwokerto saat ini hanya tersedia dalam beberapa artikel, meskipun pembahasannya belum mendalam. Penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Artikel ilmiah Diska Meizi Arinda, dkk dengan judul “Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto Tahun 1937” Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Artikel ini membahas tentang Krisis Ekonomi di Banyumas tahun 1930-1935 akibat dari depresi ekonomi dunia hingga menyebabkan perpindahan ibukota kabupaten. Sedangkan untuk penulis sendiri membahas sejarah modernisasi Purwokerto setelah perpindahan ibukota tahun 1930-1942.
2. Artikel ilmiah Esa Meiana Palupi dengan judul “Modernisasi Banyumas 1890- 1942 Kajian Perkembangana Sosial Ekonomi” Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Artikel ini membahas tentang Modernisasi Banyumas 1890-1942 yang dimulai pada masa ekonomi liberal hingga kedatangan Jepang. Sedangkan untuk penulis sendiri hanya membahas tentang modernisasi Purwokerto tahun 1930- 1942 pasca perpindahan ibukota.
3. Skripsi Aris Wahyudi dengan judul “Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto Tahun 1930-1937” Mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana proses perpindahan ibukota itu terjadi, sedangkan penelitian penulis sendiri membahas tentang bagaimana perkembangan Kota Purwokerto itu sendiri setelah pemindahan ibukota terjadi.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian sejarah, peneliti menggunakan metode sejarah, yang merupakan proses meliputi analisis dan ide tentang masa lalu untuk

menemukan generalisasi yang bermanfaat dalam mengungkap fakta-fakta sejarah. Metode penelitian sejarah secara umum adalah suatu penyelidikan atau penggalian data terkait peristiwa atau masalah yang sedang diteliti dengan menerapkan metode sebagai solusi dari sudut pandang historis. Data adalah informasi atau keterangan mengenai objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sementara informasi lebih menekankan pada aspek pelayanan, data lebih menekankan pada materi hasil peristiwa sejarah.<sup>13</sup>

Dalam proses pengumpulan data, sering kali terlihat bahwa mendokumentasikan data atau peristiwa sejarah secara rinci terkait erat dengan cara penyajian atau historiografi sejarah. Aspek pengumpulan data adalah tahap penting yang harus dilakukan sebelum penulisan sejarah dalam bentuk final, dan ini merupakan langkah kunci bagi peneliti untuk mengungkapkan peristiwa sejarah yang mungkin kabur dengan bahasa yang tepat dan efisien. Oleh karena itu, peneliti harus menghindari penggunaan bahasa yang meskipun terdengar ilmiah, justru dapat menjauhkan dari peristiwa-peristiwa yang jelas dan terperinci.<sup>14</sup>

Berikut adalah tahapan-tahapan metode penelitian sejarah yang meliputi empat langkah yaitu: Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber, Interpretasi (analisis data), penulisan (historiografi).<sup>15</sup>

### **1. Heuristik**

Kata *heuristic* kata heuristik berasal dari kata “Heuriskein” dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan, sedangkan menurut bahasa Jerman “Quellenkunde”. Heuristik merupakan suatu kegiatan mencari sumber sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji peneliti.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Renier

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 119.

<sup>14</sup> Hasan Usman, *Metode Peneletian Sejarah* (Duqqi: Darul Maarif, 1984), hlm. 214.

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018), hlm. 89.

<sup>16</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2020), hlm. 86.

yang dikutip oleh Abdurrahman menjelaskan Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Namun, heuristik sering kali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan merinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian yang berjudul “Modernisasi Kota Purwokerto tahun 1930 - 1942”. Peneliti mencoba mengumpulkan data yang berupa referensi maupun arsip-arsip berupa artikel artikel, buku maupun surat surat keputusan pemerintah yang menjelaskan atau menggambarkan tentang Perkembangan Kota Purwokerto Peneliti melakukan pencarian sumber di beberapa tempat seperti:

- 1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
- 2) Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 3) Dan beberapa koleksi pribadi.

Selain di tempat tempat tersebut, pencarian sumber ini peneliti melakukan browsing di internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai topik penelitian yang dikaji.

Adapun berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang di rekam dan di laporkan oleh para saksi mata (eyewitness). Data-data di catat dan di laporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer berupa arsip, dan artikel. Sedangkan untuk sumber sekunder, peneliti menggunakan sumber buku-buku, jurnal Beberapa sumber yang digunakan peneliti sebagai berikut.

---

<sup>17</sup> Helius Sjamsuddin, *ibid*, hlm. 64.

a. Sumber Primer

Sumber sejarah yang disampaikan oleh saksi mata.<sup>18</sup> Sumber ini merupakan laporan peristiwa yang dipaparkan oleh pelaku maupun orang sejamin yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber primer bukan hanya orang yang hadir atau menyaksikan sendiri atau pelaku peristiwa tersebut, namun juga orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian selama peristiwa berlangsung. Jika mengacu pada definisi diatas, maka sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan terkait Pindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto dari tahun 1930-1942, diantaranya adalah:

1) Sumber Arsip:

- i. Staatsblad tahun 1929 no. 242.
- ii. Staatsblad tahun 1935 no. 631.
- iii. Staatsblad tahun 1935 no. 632.
- iv. J. J Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 14 Mei 1928" Memori Serah Jabatan 1921- 1930 (Jawa Tengah), Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977
- v. M. J. van der Pauwert. 1925. Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925" Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah), Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.
- vi. W. Ch. Adrians, Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1933, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

---

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *op.cit*, hlm. 96.

b. Sumber sekunder

Data yang diperoleh dari pihak ke tiga, bukan saksi mata secara langsung.

1.) Sumber Buku:

- i. Priyadi, Sugeng. *Sejarah Kota Purwakerta (1832-2018)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- ii. Priyadi, Sugeng. *Sejarah Kota Banyumas (1571 Hingga Kini)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- iii. Nurwanti, Yustina. *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). 2015.
- iv. Herusatoto, H. Budiono. *Banyumas; Sejarah, Budaya, Bahasa, Dan Watak*. Yogyakarta: LKIS PELANGI ASKARA. 2008.
- v. Soegeng, Wijono. Sunardi. *Banjoemas Riwayatmoe Doeloe*. Purwokerto: Daya Mandiri Production. 2006.

**2. Kritik**

Dalam usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan pada tugas untuk memisahkan apa yang benar, apa yang palsu, serta apa yang meragukan atau mustahil. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali melakukan tindakan yang benar, tetapi juga tidak jarang melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak.<sup>19</sup> Kritik sumber adalah kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan kritik intern.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Helius Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 84.

<sup>20</sup> Kuntowijoyo, *ibid*, hlm. 100-101.

**a. Kritik eksternal:**

Penulis lakukan dengan cara menyeleksi sisi-sisi fisik dari sumber yang didapat. Seperti, sumber yang didapat berupa manuskrip maka harus diteliti kertasnya, kata- katanya, bahasanya, kalimatnya, tinta yang digunakan, gaya tulisannya, juga bentuk luar dari sumber tersebut.

**1. Sumber Primer:**

- i. Arsip “*Staatsblad* tahun 1929 no. 242.” terdiri dari 4 halaman dan 8 artikel. Ditanda tangani oleh Sekretaris Jendral G.R. Erdbrink. Arsip ini berbentuk scan foto yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- ii. Arsip “*Staatsblad* tahun 1935 no. 631.” terdiri dari 4 halaman dan 8 artikel. Ditanda tangani oleh Sekretaris Jendral J.M. Kiveron. Arsip ini berbentuk scan foto yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- iii. Arsip “*Staatsblad* tahun 1935 no. 632.” terdiri dari 15 halaman dan ditanda tangani oleh Sekretaris Jendral J.M. Kiveron. Arsip ini berbentuk scan foto yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- iv. Arsip “Memori Residen Banyumas, 14 Mei 1928” ditulis oleh J. J Helsdingen, Memori Serah Jabatan 1921- 1930 (Jawa Tengah). Arsip ini berbentuk scan microfilm yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- v. Arsip “Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925” ditulis oleh M. J. van der Pauwert, Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah). Arsip ini berbentuk scan foto yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

- vi. Arsip “Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1933” ditulis oleh W. Ch. Adrians. Arsip ini berbentuk microfilm seri 2e reel 6, yang di dapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

## **2. Sumber Sekunder:**

- i. Buku yang berjudul “Sejarah Kota Purwakerta (1832-2018)” ini terbit pada tahun 2019. Ditulis oleh Sugeng Priyadi seorang Profesor Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buku ini didapatkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Banyumas.
- ii. Buku yang berjudul “Sejarah Kota Banyumas (1571 Hingga kini) terbit pada tahun 2018. Ditulis oleh Sugeng Priyadi seorang Profesor Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buku ini didapatkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Banyumas.
- iii. Buku yang berjudul “Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942” ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta. Buku ini berbentuk *e-book* dan dimiliki oleh penulis sendiri.
- iv. Buku yang berjudul “Banyumas; Sejarah, Budaya, Bahasa, Dan Watak” ini terbit pada tahun 2008. Buku ini berbentuk *e-book* dan dimiliki sendiri oleh penulis.
- v. Buku yang berjudul “Banjoemas Riwayatmoe Doeloe” diterbitkan pada tahun 2006. Buku ini dapat diakses di Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Banyumas.

## **b. Kritik Internal:**

Selanjutnya, penulis melakukan kritik internal yakni kritik yang mengacu pada keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas).<sup>21</sup> Artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak terjadi manipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Beberapa sumber yang diuji dalam kritik intern sebagai berikut:

### **1. Sumber Primer:**

- i. Staatsblad tahun 1929 no. 242, tentang Pembentukan Pemerintahan, Desentralisasi Kabupaten-kabupaten Jawa Tengah, Petunjuk Kabupaten Banyumas menjadi Kota Mandiri.
- ii. Staatsblad tahun 1935 no. 631. tentang Pembentukan Pemerintahan, Desentralisasi Kabupaten-Kabupaten Jawa Tengah, Peraturan hukum publik akibat dari penghapusan Kabupaten Purwokerto dan penggabungan wilayah itu dengan Kabupaten Banyumas, yang mana kabupaten dari distrik Purworejo digabung dengan Kabupaten Banjarnegara.
- iii. Staatsblad tahun 1935 no. 632. Tentang Urusan Dalam Negeri Jawa Tengah, Setelah penunjukan administrasi pembagian provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan penghapusan Kabupaten Karanganyar, Batang, dan Purwokerto.
- iv. J. J. Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 14 Mei 1928" Memori Serah Jabatan 1921- 1930 (Jawa Tengah), Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977
- v. M. J. van der Pauwert. 1925. Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925" Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa

---

<sup>21</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 109.

Tengah), Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.

- vi. W. Ch. Adrians, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1933*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

## **2. Sumber Sekunder:**

- i. Buku yang berjudul “Sejarah Kota Purwakerta (1832-2018)” ini terbit pada tahun 2019. Ditulis oleh Sugeng Priyadi seorang Profesor Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buku ini berisi tentang sejarah kota Purwokerto dimulai pasca Perang Diponegoro hingga 2019.
- ii. Buku yang berjudul “Sejarah Kota Banyumas (1571 Hingga kini) terbit pada tahun 2018. Ditulis oleh Sugeng Priyadi seorang Profesor Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buku ini berisi tentang sejarah Kota Banyumas dimulai sejak Kerajaan Pasirluhur hingga 2018.
- iii. Buku yang berjudul “Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942” ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta. Buku ini berisi tentang sejarah perkembangan ekonomi dan budaya Banyumas masa kepemimpinan Bupati Gandasubrata tahun 1913 hingga kedatangan Jepang.
- iv. Buku yang berjudul “Banyumas; Sejarah, Budaya, Bahasa, Dan Watak” ini terbit pada tahun 2008. Buku ini berisi tentang sejarah dan gambaran budaya, bahasa, serta watak masyarakat Banyumas.
- v. Buku yang berjudul “Banjoemas Riwayatmoe Doeloe” diterbitkan pada tahun 2006. Buku ini berisi tentang

gambaran keadaan Banyumas masa Hindia Belanda beserta foto-fotonya.

### 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah penting dalam memahami fakta sejarah. Dalam proses interpretasi, terdapat dua tahapan yang krusial, yakni analisis (penguraian) dan sintesis (penggabungan). Dengan melakukan analisis, fakta-fakta sejarah dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan kemudian melalui sintesis, bagian-bagian tersebut digabungkan kembali sehingga membentuk sebuah pemahaman yang saling terhubung satu sama lain.<sup>22</sup>

Interpretasi, menurut Kuntowijoyo yang dikutip Abdurahman (2007: 73) interpretasi sejarah atau yang biasa disebut juga dengan analisis sejarah merupakan tahap dimana peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Gottschalk yang dikutip oleh Ismaun (2005: 56) menambahkan bahwa interpretasi atau penafsiran sejarah itu memiliki tiga aspek penting, yaitu : pertama, analisis-kritis yaitu menganalisis struktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta. Kedua, historis-substantif yaitu menyajikan suatu uraian prosesusual dengan dukungan fakta-fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan ketiga adalah sosial-budaya yaitu memperhatikan manifestasi insani dalam interaksi dan interrelasi sosial-budaya.

Dalam langkah ini peneliti berusaha menafsirkan data yang telah diverifikasi. Sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektivitas penulis sejarah di akui, tetapi untuk dihindari.

---

<sup>22</sup> I Gede Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah* (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 18.

Dengan menggunakan kajian sosiologi perkotaan juga membantu peneliti dalam melihat perubahan infrastruktur dan tata ruang kota selama periode kolonial, termasuk pembangunan infrastruktur publik. Ini juga termasuk mempelajari bagaimana perubahan ini mempengaruhi mobilitas sosial dan ekonomi penduduk.

Teori ini dinilai sangat cocok untuk penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini penulis meneliti tentang kajian sejarah kota yang dimana isi dari pembahasannya membahas tentang permasalahan-permasalahan kota yang ada mencakup sosial dan ekonomi.

#### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan cara merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah.<sup>23</sup> Dalam interpretasi, subjektivitas sejarah menjadikan penulisan sejarah menjadi relatif. Akan tetapi, dalam keseluruhan penulisan sejarah tidak semuanya bersifat relatif karena dalam penulisan sejarah terdapat juga fakta-fakta sejarah yang tidak diragukan lagi kebenarannya (bersifat absolut).

Dalam langkah penelitian historiografi penulis melakukan penulisan sejarah terkait dengan Modernisasi Kota Purwokerto Tahun 1930-1942 berdasarkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan interpretasi yang dimaksud untuk menjelaskan fakta tersebut dari sudut pandang penulis. Dengan melakukan historiografi, penulis mampu menuliskan penelitian ini dengan sumber data-data yang valid dan isinya pun dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tahapan ini, penulis membaginya ke dalam empat bagian.

Bagian pertama atau Bab I adalah Pendahuluan. Di dalamnya penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kajian Pustaka; serta Metode Penelitian yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

---

<sup>23</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah Teori -Metode-Contoh Aplikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 148.

Bagian kedua atau Bab II adalah bab dengan judul Gambaran Umum Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto tahun 1930-1935. Bab II ini terdiri dari sub bab Kondisi Geografis dan Demografis Kab. Banyumas dan Kota Purwokerto, Perpindahan Ibukota Banyumas ke Purwokerto.

Bagian ketiga atau Bab III adalah bab dengan judul Modernisasi Kota Purwokerto tahun 1930-1942. Bab III ini terdiri dari beberapa sub bab seperti, transportasi dan Jaringannya, Pelayanan Publik, Sarana Perekonomian dan Industri, Sarana Sosial, Sarana Pendidikan.

Bagian keempat atau Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan.

